

Implementasi Program Kurikulum Merdeka Berdasarkan Kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Di SMAN 1 Caringin Kab.

Bogor

Yeni Handayani¹, Denny Hernawan², Gotfridus Goris Seran³

^{1,2,3} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda

Korespondensi : Yeni Handayani (Email : yhandayani926@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah tentang bagaimana proses implementasi atau pelaksanaan Program Kurikulum Merdeka sesuai dengan Kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 di SMAN 1 Caringin, Kabupaten Bogor. Tujuan tambahan penelitian ini yaitu menemukan faktor yang menghambat serta langkah yang diambil dalam upaya untuk memastikan kesuksesan implementasi kebijakan yang telah dibuat itu. Harapannya, pengimplementasian Program Kurikulum Merdeka di Kabupaten Bogor dapat berjalan secara optimal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dan teknik sampel yang diterapkan adalah sampel jenuh dengan melibatkan 48 responden yang merupakan tenaga pendidik atau guru di SMAN 1 Caringin. Penentuan hasil penelitian ditentukan dengan rumus Slovin dan perhitungan Weighted Mean Score (WMS). Hasil pengoperasian Variabel penelitian ini merujuk pada teori keberhasilan implementasi kebijakan George C Edward III. rekapitulasi angket mendapat nilai penghitungan sebesar 3,85 dengan kategori "Baik". Hal ini menunjukkan bahwa Program Kurikulum Merdeka di SMAN 1 Caringin, Kabupaten Bogor, berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Implementasi, Kebijakan

I. PENDAHULUAN

Pada era ke-21 ini, pendidikan telah mengalami perubahan yang signifikan, tidak hanya berfokus pada aspek teknis saja, namun juga bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara berkelanjutan. Hal ini sangat penting di Era Revolusi Masyarakat 5.0 dan Era Revolusi Industri 4.0, dimana sistem pendidikan harus terus disesuaikan dengan perkembangan jaman. Topik yang menjadi banyak perhatian dan sering dibicarakan adalah peningkatan kualitas pendidikan, di daerah perkotaan hingga daerah terpencil. Untuk mengatasi keterbelakangan, menghilangkan kebodohan, penindasan dan hambatan bagi pertumbuhan manusia,

diperlukan pendekatan pendidikan yang bersifat memerdekakan dan memerdekakan diri.

Salah satu inisiatif dari Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim adalah pengembangan program kebijakan kemandirian belajar. Program ini dibuat dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurut informasi yang disampaikan melalui situs resmi Kementerian Pendidikan, kebijakan kemandirian belajar dirancang secara cermat dengan tujuan memberikan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan cita-cita pendidikan negara.

Penerapan program Kurikulum Merdeka adalah wujud dari visi perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia yang diungkapkan oleh Widyastuti (2022:5) sebagai upaya menciptakan "Pelajar Pancasila." Peraturan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, yang mengamandemen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2020-2024., menetapkan konsep "Pelajar Pancasila" sebagai gambaran kaum pelajar Indonesia yang berkomitmen untuk belajar sepanjang masa, dan memiliki kompetensi yang berorientasi secara mendunia, dan mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Konsep ini mencakup enam dimensi utama, yaitu: 1. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, 2. keberagaman global, 3. semangat gotong royong, 4. kemandirian, 5. kemampuan berpikir kritis, dan 6. kreativitas. (Yelvita, 2022)

Langkah proses belajar yang direncanakan untuk mencapai Profil Pelajar Pancasila adalah Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Menurut penjelasan Kemendikbud (2021:5), P5 sebagai bentuk dari proses belajar yang mencakup berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan pendekatan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021, program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu proses belajar dalam kurikulum dan pelaksanaan

Proyek Penguatan Profil Siswa Pancasila. Selain itu, dalam Kemendikbudristek Republik Indonesia Nomor 262/M/2022, disebutkan bahwa P5 bertujuan untuk memperkuat setiap upaya dalam mencapai Profil Pelajar Pancasila.

Implementasi Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah suatu inovasi yang relatif baru ada di dalam sistem pendidikan Indonesia, dan oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ditemui berbagai kendala dan masalah. Masalah – masalah ini mencakup aspek-aspek seperti :

1. Pelaksanaan pembelajaran, sebagian guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan juga beberapa guru mengalami hambatan dalam mengadaptasi perubahan kurikulum yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.
2. Kesiapan lembaga pendidikan (Internal), Lebih banyak kebebasan dalam merancang pembelajaran menjadi tantangan sehingga guru tidak memiliki panduan atau bimbingan yang jelas, Informasi disebarkan secara tidak merata mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemahaman dan penerapan Kurikulum Merdeka di berbagai sekolah. Dan pelatihan yang diperlukan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka tidak mencukupi. Selain itu keputusan atau panduan terkait implementasi Kurikulum Merdeka yang sering berubah – ubah.
3. Penyediaan fasilitas dan sarana pendukung, Sekolah menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk kurangnya buku teks, perangkat teknologi, atau fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran yang lebih variatif.
4. Persiapan lingkungan sekolah (Eksternal), Tidak semua Orang tua sepenuhnya memahami atau mendukung pendekatan Kurikulum Merdeka, Beberapa peserta didik mungkin tidak mampu membeli materi pembelajaran tambahan atau berpartisipasi dalam kegiatan praktek yang mendukung Kurikulum Merdeka.

SMAN 1 Caringin memiliki sejarah pendidikan yang panjang di Kecamatan Caringin dan menjadi salah satu Sekolah Penggerak Program Kemendikbud di kabupaten Bogor. Sekolah juga telah menerapkan kurikulum merdeka serta mengadopsi Pembelajaran P5. Pembelajaran P5 adalah jenis pembelajaran yang adaptif, dapat disesuaikan dengan konteks saat itu. Melalui implementasi Pembelajaran P5, siswa didorong untuk aktif terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar, serta memberikan peluang kesempatan kepada siswa atau murid di kelas untuk dapat terlibat dalam kegiatan belajar.

Menurut pemaparan konteks yang sudah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki niat untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki, menjelaskan, dan menganalisis lebih mendalam tentang Implementasi Program Kurikulum Merdeka Berdasarkan Kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Di SMAN 1 Caringin Kab. Bogor.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pandangan Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik (2015:19), Jenis penelitian kuantitatif yaitu yang terstruktur, terencana, dan sistematis dari awal hingga desain penelitiannya. Penelitian ini menggunakan data berupa angka secara luas, dari pengumpulan data, interpretasi, hingga penyajian hasil. Tujuan utama penelitian kuantitatif adalah menjelaskan suatu masalah dan membuat generalisasi. Generalisasi ini diperoleh melalui metode perkiraan atau estimasi yang berlaku umum dalam statistika induktif, dimana estimasi ini didasarkan pada pengukuran sampel yang mewakili populasi atau data dalam penelitian tersebut.

Dari segi objek penelitian, populasi dalam kajian penelitian ini yaitu jajaran staff guru atau tenaga pendidik yang ada di SMAN 1 Caringin. Yang terdiri dari total guru 48 orang. Teknik sampel yang diterapkan yaitu sampel jenuh yang mencakup seluruh populasi atau keseluruhan responden. Metode pengumpulan data mencakup penggunaan angket/kuisisioner, penelitian kepustakaan, dan studi lapangan, yang

melibatkan observasi untuk mendapatkan informasi atau data dengan cara terlibat langsung di lapangan. Data dan informasi terkumpul melalui penyebaran kuisisioner/angket, pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Pada saat analisis data memanfaatkan metode analisa dengan perhitungan rumus WMS dan menerapkan skala Likert sebagai alat pengukur tanggapan responden terhadap aspek yang menjadi fokus penelitian. Berikut adalah opsi jawaban dalam skala Likert pada kuesioner.

Tabel 3.1

Pemberian Skor Kuisisioner Implementasi Program Kurikulum Merdeka

Rentang Nilai	Penafsiran
1	Sangat Tidak Baik
2	Tidak Baik
3	Cukup
4	Baik
5	Sangat Baik

Dalam konteks di mana alternatif jawaban diurutkan berdasarkan peringkat posisi, peneliti menerapkan metode analisis menggunakan Weighted Mean Score (WMS) untuk menentukan hasil akhir atau kesimpulan dari data. Setiap jawaban yang dipilih diberi bobot, dengan menetapkan nilai skor yang mencerminkan peringkatnya, biasanya dari 1 hingga 5, dengan selisih standar antara setiap peringkat adalah 1. Proses penghitungan dapat dilakukan dengan menggabungkan nilai bobot jawaban yang diberikan oleh responden. Dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini :

$$I = \frac{SKTR - SKR}{V}$$

Keterangan:

I = Interval

SKT = Skor Tertinggi

SKR = Skor Terendah

V = Jumlah

$$\frac{I = 5 - 1}{5} = 0,8$$

Tabel 3.2
Konsultasi Hasil Weighted Means Score (WMS)

1-1,80	Sangat Tidak Baik/ <u>Sangat Tidak Dipahami</u>
1,81-2,60	<u>Tidak Baik/Tidak Dipahami</u>
2,61-3,40	Cukup Baik/ <u>Cukup Dipahami</u>
3,41-4,20	Baik/ <u>Dipahami</u>
4,21-5.00	Sangat Baik/ <u>Sangat Dipahami</u>

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan lalu akan dianalisis melalui kuesioner dengan menerapkan rumus Weighted Mean Score (WMS). Rumus ini berguna untuk menghitung nilai rata-rata tertimbang dari tanggapan yang telah diberikan oleh para responden terhadap setiap item pertanyaan dalam kuesioner. Rumus tersebut dapat dipaparkan seperti dibawah ini:

$$M = \frac{\sum f(x)}{n}$$

Keterangan:

- M = peroleh angka penafsiran atau kriteria penafsiran
- f = frekuensi jawaban responden
- x = pembobotan (skala nilai)
- n = jumlah sampel penelitian

Tabel 3.2
Tabel Frekuensi Untuk Tiap Item

No	<u>Alternatif Jawaban</u>	F	X	F(X)	$M = \frac{\sum f(x)}{n}$
1	<u>Sangat Baik/Sangat Dipahami</u>		5		
2	<u>Baik/Dipahami</u>		4		
3	<u>Cukup Baik/Cukup Dipahami</u>		3		
4	<u>Tidak Baik/Tidak Dipahami</u>		2		
5	<u>Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Dipahami</u>		1		

Penelitian dilakukan dalam rentang waktu tiga bulan agar mendapatkan informasi yang menyeluruh dan data yang akurat, sesuai dengan situasi yang ada di lapangan. Tujuannya adalah agar peneliti dapat mengarahkan penelitian secara lebih efisien pada aspek yang diinginkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis implementasi program kurikulum merdeka berdasarkan Kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 di SMAN 1 Caringin Kabupaten Bogor, terdapat beberapa faktor pendukung atau bahkan penghambat yang dapat dirujuk dari pemikiran Georg C. Edwards. Ada empat elemen yang memengaruhi pelaksanaan atau implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Variabel Implementasi Kebijakan Program Kurikulum Merdeka berdasarkan Kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 di SMAN 1 Caringin Kab. Bogor

Variabel	Dimensi	Indikator	Mean	Kategori
	Komunikasi	Kejelasan informasi program	3,93	Baik
		Transmisi dalam akses informasi	3,97	Baik
		Transmisi dalam penyebaran informasi antara guru dan siswa	3,89	Baik

<p>Implementasi Kebijakan (George C. Edward III (1980) dalam Dyah dan Erwan (2015))</p>		Transmisi tingkat partisipasi komunikasi antara guru/pendidik, orang tua wali murid dan siswa	3,91	Baik	
		Transmisi dalam penyebaran informasi kepada orang tua wali murid	3,85	Baik	
		Konsisten dalam memahami isi dan tujuan program	3,66	Baik	
		Nilai Rata-rata	3,87	Baik	
	<p>Sumber Daya</p>		Fasilitas sarana pembelajaran	3,79	Baik
			Fasilitas kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga	3,68	Baik
			Kewenangan alokasi dana program	3,54	Baik
			Staff sumber daya mengenai jumlah dan kualitas guru	3,85	Baik
			Informasi sumber daya mengenai pedoman dan aturan	3,81	Baik
			Nilai Rata-rata	3,73	Baik
	<p>Disposisi</p>		Motivasi Guru dalam mengikuti program kurikulum merdeka	4,02	Baik
			Dampak positif pada proses pembelajaran guru selama mengikuti program kurikulum merdeka	3,95	Baik
			Dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah dalam	3,97	Baik

		pelaksanaan program kurikulum merdeka			
		Keterlibatan orang tua dalam mendukung program kurikulum merdeka	3,70	Baik	
		Nilai Rata-Rata	3,91	Baik	
	Struktur Birokrasi		Fragmentasi struktur organisasi SMAN 1 Caringin mendukung program kurikulum merdeka	3,87	Baik
			Kebijakan sekolah dalam mendukung penerapan Program Kurikulum Merdeka (SOP)	3,93	Baik
			Koordinasi antara tingkatan kepemimpinan jenjang sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para koordinator) dalam mengelola Program Kurikulum Merdeka	3,91	Baik
			Nilai Rata-Rata	3,90	Baik
			Total Nilai Rata-Rata	3,85	Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan tabel yang disajikan, hasil rekapitulasi menyatakan bahwa total nilai rata – rata dari tanggapan para responden adalah 3,85, dan kategori Baik. Dimensi Disposisi mendapat nilai rata - rata yang teratas yaitu 3,91, dan indikator motivasi guru dalam mengikuti program kurikulum merdeka mendapat nilai rata - rata 4,02. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Motivasi guru sangat penting karena guru adalah pelaksana utama dalam menerapkan kurikulum di kelas.

Ketika guru memiliki motivasi yang kuat, guru akan lebih terbuka terhadap perubahan, lebih aktif dalam mengikuti pelatihan, dan lebih kreatif dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang mengikuti prinsip - prinsip Kurikulum Merdeka melibatkan motivasi jajaran staff guru atau tenaga pendidik yang kuat. Motivasi guru akan memengaruhi kualitas pengajaran mereka, meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan belajar mengajar , dan hasil pencapaian belajar para siswa.

Nilai rata - rata terendah ada pada dimensi Sumber Daya dengan nilai 3,73, khususnya pada indikator fasilitas alokasi dana program yang memiliki nilai rata - rata sebesar 3,54. Implementasi kurikulum baru seringkali membutuhkan investasi finansial yang signifikan untuk menyediakan pelatihan bagi guru, memperbarui sumber belajar, memperbaiki fasilitas pembelajaran, dan mengadopsi teknologi pendidikan yang diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah cenderung sudah ditetapkan berdasarkan alokasi yang tertera sehingga sekolah tidak bisa secara leluasa untuk menggunakan dana yang ada untuk kebutuhan penunjang lainnya.

IV.KESIMPULAN

Mangacu pada hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi Kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 dalam Kurikulum Merdeka di SMAN 1 Caringin, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Implementasi atau penerapan Kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 dalam program kurikulum merdeka di SMAN 1 Caringin berjalan dengan Baik
2. Implementasi Kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Dalam Kurikulum Merdeka di SMAN 1 Caringin mendapat nilai rata – rata 3,85 tanggapan dari

responden dan masuk ke dalam kategori Baik. Dimensi Disposisi memiliki nilai rata - rata teratas yaitu 3,91, dengan indikator motivasi guru dalam mengikuti program kurikulum merdeka mendapat nilai rata - rata sebesar 4,02 dan nilai rata – rata terendah ada pada dimensi Sumber Daya dengan nilai rata – rata 3,73, khususnya pada indikator fasilitas alokasi dana program yang memiliki nilai rata - rata 3,54.

3. Hambatan dan tantangan dalam implementasi Kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 dalam Kurikulum Merdeka di SMAN 1 Caringin meliputi beberapa aspek. Pertama, terdapat tantangan terkait kesiapan sumber daya manusia. Selanjutnya, kurangnya infrastruktur dan sumber daya juga menjadi hambatan dalam proses implementasi. Selain itu, adaptasi dan modifikasi Kurikulum Merdeka agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal merupakan tantangan lain yang dihadapi. Proses penyesuaian ini membutuhkan waktu, sumber daya, dan dukungan yang cukup. Selain itu, keterlibatan yang aktif dari berbagai pihak, seperti tenaga pendidik atau guru, pelajar, wali murid dan orang tua, serta masyarakat sekitar, juga diperlukan dalam proses pengimplementasian program Kurikulum Merdeka.
4. Upaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam implementasi Kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Dalam Kurikulum Merdeka di SMAN 1 Caringin dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, adalah dengan memperpanjang peran fasilitator yang bertugas menjadi pendamping dan pendukung bagi pengawas sekolah/pemilik, kepala sekolah, guru/pendidik dengan tujuan menciptakan lingkungan sekolah yang berorientasi pada murid. Disamping itu juga pemantauan dan penilaian terhadap jalannya pelaksanaan program kurikulum merdeka di sekolah harus dilakukan secara rutin. Upaya lainnya adalah dengan meningkatkan partisipasi dari semua pihak yang terlibat,

termasuk orang tua wali murid, tenaga pendidik/guru, siswa, dan masyarakat lokal, dalam proses pengembangan, implementasi, dan evaluasi Kurikulum Merdeka.

V. REFERENSI

- Apriliyani, N. V., Hernawan, D., Purnamasari, I., Seran, G. G., & Sastrawan, B. (2022) *Implementasi program merdeka belajar kampus merdeka*. Jurnal Governansi, 8(1), 11-18. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i1.5045>
- Barkah, A. I. (2023) *Implementasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Menggunakan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jember Tahun Pelajaran 2022/2023* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember). <http://digilib.uinkhas.ac.id/25230/>
- Batubara, C. M. (2023) *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 2 Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/24030/>
- Budi, M. R. (2023) *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Pembelajaran PAI di SMAN 2 Lintau Buo*. (Skripsi Sarjana, Universitas IAIN Batu sangkar) <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/28430>
- Desi, S. (2023) *Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka Di Sdit Fitrah Insani Kedamaian Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). <http://repository.radenintan.ac.id/30725/1/SKRIPSI%201-2.pdf>
- Ernianti, B. (2019) *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar) https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7205-Full_Text.pdf
- Haerul, H., Akib, H., & Hamdan, H. (2016) *Implementasi Kebijakan Program Makassar tidak rantasa (mtr) di kota Makassar*. Jurnal ilmiah ilmu administrasi publik, 6(2), 97315. <https://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477>

- Hayati, N. (2019) Pengaruh Penerapan Manajemen Strategi Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di MTs Madani Alauddin. (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar) <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13805/>
- Huri, D., Hernawan, D., & Seran, G. G. (2019) *Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakan Disiplin Masyarakat Di Kawasan Umum Kota Bogor*. Jurnal Governansi, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1698>
- Khairunnisa, K. (2023) Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Sumbersari 2 Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/52136/>
- Lestari, E. (2017) Pengaruh Pengorganisasian Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Impres Bangkala II Kota Makassar. (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar) <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/11664/>
- Muscahyanti, A. (2021) Analisis Aktivitas Belajar Multisensori Peserta Didik dalam Pembelajaran Tematik Kelas IV MI Al Husna Lebak Bulus (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://doi.org/10.15408/elementar.v1i1.20889>
- Nugroho, M. H. A. (2020) Implementasi Kebijakan Perparkiran Di Kawasan Grand Indonesia (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57128>
- Ramdani, F. T., Apriliani, A., Ilyanawati, R. Y. A., Apriliyani, N. V., Ramadanti, N. P., & Pratami, M. (2023) *Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda*. Jurnal Governansi, 9(1), 1-6. <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i1.7419>
- Subandi, A. (2017) Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42718>
- Syafarina, R. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung

Barat) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
<http://repository.unpas.ac.id/27743/>

Wilsani, W. (2023) Analisis Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar (Doctoral dissertation, Universitas Jambi). <https://repository.unja.ac.id/56445/>

Wulandari, N. D. (2023) Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sd Muhammadiyah Al Mujahidin Wonosari (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59520/>

Yuliah, E. (2020) *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022

Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)